

**AGITASI KEBUDAYAAN UNTUK PENGUASAAN POLITIK OLEH
PARTAI KOMUNIS INDONESIA (PKI) MELALUI SENI DAN SASTRA**

SKRIPSI

Oleh :

TRI ANJANI



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2023**

ABSTRAK

AGITASI KEBUDAYAAN UNTUK PENGUASAAN POLITIK OLEH PARTAI KOMUNIS INDONESIA (PKI) MELALUI SENI DAN SASTRA

Oleh

TRI ANJANI

Masa Demokrasi Terpimpin merupakan masa keemasan bagi Partai Komunis Indonesia (PKI), karena pada masa ini PKI mencapai puncak kekuasaannya dalam berbagai bidang termasuk kebudayaan. PKI menggunakan berbagai cara dalam kegiatan kampanyenya salah satunya dengan menggunakan kesenian yaitu seni pertunjukan dan sastra. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran seni dan sastra sebagai alat dan saluran politik PKI dalam penguasaan politik di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis yaitu dengan melalui langkah heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan teknik analisis data historis atau teknik analisis data sejarah. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa PKI menjalin kedekatan dengan Lekra untuk menjembatani PKI dalam melakukan penguasaan dibidang kebudayaan, Selain menjalin kedekatan dengan Lekra, PKI juga melakukan pendekatan dengan kelompok-kelompok kesenian daerah serta membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada kesenian tersebut. PKI juga membantu mengenalkan kesenian daerah kepada rakyat melalui media massa yang dimiliki PKI. PKI juga bersama-sama dengan kelompok kesenian menciptakan karya yang bertema kerakyatan.

Kata kunci : Agitasi, PKI, Politik

ABSTRACT

CULTURE AGITATION FOR POLITICAL CONTROL BY THE INDONESIAN COMMUNIST PARTY (PKI) THROUGH ARTS AND LITERATURE

By

TRI ANJANI

The Guided Democracy period was a golden era for the Indonesian Communist Party (PKI), because during this period the PKI reached its peak of power in various fields including culture. The PKI used various methods in its campaign activities, one of which was by using art, namely performing arts and literature. This study aims to determine the role of art and literature as tools and channels of PKI politics in political control in Indonesia. The method used in this study is the historical method through heuristic, criticism, interpretation and historiography steps. The data collection technique used is a literature study. The data analysis technique used is historical data analysis techniques or historical data analysis techniques. The results of this study concluded that the PKI established closeness with Lekra to bridge the PKI in mastering the field of culture. In addition to establishing closeness with Lekra, the PKI also approached local arts groups and helped solve problems that occurred in the arts. The PKI also helped introduce local arts to the people through the mass media owned by the PKI. The PKI also, together with art groups, created works with a populist theme.

Keywords: Agitation, PKI, Politics

**AGITASI KEBUDAYAAN UNTUK PENGUASAAN POLITIK OLEH
PARTAI KOMUNIS INDONESIA (PKI) MELALUI SENI DAN SASTRA**

Oleh

TRI ANJANI

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Program Studi Pendidikan Sejarah
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **AGITASI KEBUDAYAAN UNTUK
PENGUASAAN POLITIK OLEH PARTAI
KOMUNIS INDONESIA (PKI) MELALUI
SENI DAN SASTRA**

Nama Mahasiswa : **Tri Anjani**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1713033021

Program Studi : Pendidikan Sejarah

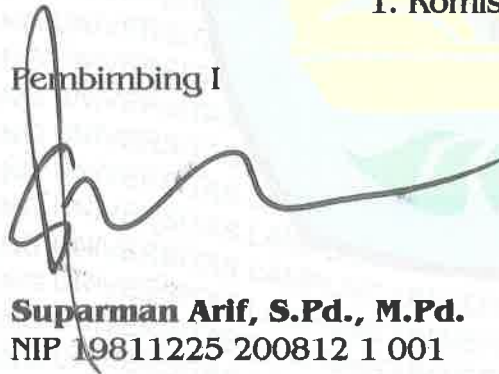
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Suparman Arif, S.Pd., M.Pd.
NIP 19811225 200812 1 001

Pembimbing II



Nur Indah Lestari, S.Pd., M.Pd.
NIP 19900721 201903 2 020

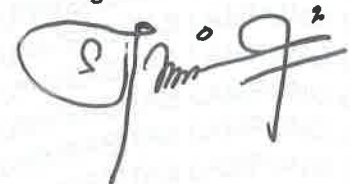
2. Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial



Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd.
NIP 19741108 200501 1 003

Ketua Program Studi
Pendidikan Sejarah



Yustina Sri Ekwandari, S.Pd., M.Hun
NIP 19700913 200812 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Suparman Arif, S.Pd., M.Pd.



Penguji Utama : Drs. Maskun, M.H.

Sekretaris : Nur Indah Lestari, S.Pd., M.Pd.



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Prof. Dr. Sunyono, M.Si.
NIP 19651230 199111 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juni 2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Tri Anjani
2. NPM : 1713033021
3. Program Studi : Pendidikan Sejarah
4. Jurusan : Pendidikan IPS / FKIP
5. Alamat : Desa Watuagung, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Agitasi Kebudayaan untuk Penguasaan Politik oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) Melalui Seni dan Sastra” bukan hasil jiplakan dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya karya atau pendapat yang pernah saya tulis atau di terbutkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 25 Mei 2023



Tri Anjani
NPM. 1713033021

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Desa Watuagung, pada tanggal 26 Desember 1999, merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sugiyem dan Ibu Wasinah. Penulis memulai pendidikan di SD Negeri 2 Watuagung pada tahun 2005 dan tamat belajar pada tahun 2011. Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya yaitu di SMP Negeri 2 Kalirejo dan lulus pada tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Bangunrejo dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis diterima di Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Penulis diterima di Universitas Lampung tepatnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan IPS, Program Studi Pendidikan Sejarah.

Rangkaian perjalanan kuliah yang penulis jalani diantaranya telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada semester VI di desa Margo Rahayu, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji dan pada semester VII penulis melaksanakan program Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di SMA Negeri 1 Bangunrejo. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam organisasi FOKMA (Forum Komunikasi Mahasiswa) Pendidikan Sejarah sebagai Kepala Bidang Danus (Dana dan Usaha), selain itu penulis juga aktif dalam organisasi FORKOM BIDIKMISI UNILA sebagai sekretaris divisi PPMB (Pendidikan, Pelatihan Minat dan Bakat).

MOTTO

“Melalui pendidikan yang baiklah semua kebaikan di dunia muncul.”

(Immanuel Kant)

“Bangkitlah wahai manusia, kegagalan bukanlah takdirmu. Engkau telah dianugerahi intelegensia untuk menghindari kegagalan.”

(Atharva Weda. 8.1.6)

“Pengetahuan adalah kecantikan manusia yang paling agung dan merupakan harta yang tersembunyi.”

(Niti Sataka. 16)

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah dan karunia-Nya yang telah terlimpah dan tercurah dengan begitu luar biasanya kepadaku. Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur, kupersembahkan sebuah karya ini sebagai tanda cinta dan sayangku kepada:

Kedua orang tuaku Bapak Sugiyem dan Ibu Wasinah yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, pengorbanan, dan kesabaran. Terimakasih atas setiap tetes keringat, dan yang selalu membimbingku, mendoakan keberhasilanku, menasehatiku serta mendukungku, sungguh semua yang telah Bapak dan Ibu berikan tidak mungkin dapat terbalaskan.

Almamater tercinta

“Universitas Lampung”.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi ini berjudul **“Agitasi Kebudayaan untuk Penguasaan Politik oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) melalui Seni dan Sastra”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Sunyono, M.Si., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd., Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Albet Maydiantoro, S.Pd.,M.Pd., Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
4. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Dedy Mizwar,S.Si.,M.Pd.. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
6. Ibu Yustina Sri Ekwandari,S.Pd.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas. Terimakasih atas segala saran, bimbingan dan kepeduliannya selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.

7. Bapak Drs. Maskun, M.H., Sebagai pembahas skripsi penulis. Terimakasih atas segala saran, bimbingan dan kepeduliannya selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.
8. Bapak Suparman Arif, S.Pd.,M.Pd., sebagai pembimbing I skripsi penulis. Terimakasih atas segala saran, bimbingan dan kepeduliannya selama penulis menjadi mahasiswa di Program studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.
9. Ibu Nur Indah Lestari, S.Pd.,M.Pd., sebagai pembimbing II skripsi penulis. Terimakasih atas segala saran, bimbingan dan kepeduliannya selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.
10. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah dan staf administras, terimakasih atas ilmu, bantuan dalam bentuk apapun, motivasi, dukungan dan pengalaman yang diberikan selama proses belajar baik didalam kampus maupun diluar kampus.
11. Bapak dan Ibu staf tata usaha dan karyawan Universitas Lampung.
12. Teruntuk Mas dan Mbak ku tersayang Yusanto, Susanti, M Jefri Yanto, Junah Nuraini, serta saudara sepupu yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatau, terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan selama penulis menempuh pendidikan.
13. Teman-teman seperjuangan di Pendidikan Sejarah angkatan 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan yang telah diberikan kepada penulis, semua kenangan, dan kebersamaan selama melasanakan kegiatan perkuliahan yang tidak akan pernah penulis lupakan.
14. Teman-teman pengurus Forkom Bidikmisi Unila periode 2019/2020, terimakasih telah mengajarkan banyak hal dan melewati suka duka bersama selama kepengurusan.
15. Teman-teman Fokma Pendidikan Sejarah periode 2019/2020, terimakasih untuk kepercayaan, kerjasama dan bantuannya selama kepengurusan.
16. Teman-teman KKN Desa Margo Rahayu kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji tahun 2020 dan PLP SMAN 1 Bangunrejo tahun 2020, terimakasih atas kebersamaannya selama menjalankan tugas.

17. Teman-teman terbaikku Lurensia Vinsana Dewi, Revi Eka Putri S, Endang Arefiyanti dan Nining Yulianti, yang telah memberikan semangat dan motivasi. Terimakasih telah banyak membantu baik dalam proses mengerjakan skripsi maupun selama proses perkuliahan penulis.
18. Jodoh penulis kelak, meskipun saat ini penulis belum mengetahui keberadaanmu entah di bumi bagian mana dan sedang mengejar apa atau menggenggam tangan siapa, namun ingat seperti kata Bj Habibie “Kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun, saya yang dapat”.
19. Last but not least, Terimakasih kepada diri sendiri, telah kuat bertahan dan mau melanjutkan perjalanan sampai titik ini, dan semoga kedepannya tetap selalu kuat dan tetap semangat.

Semoga hasil penulisan penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Penulis mengucapkan terimakasih banyak atas segala bantuannya, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kebahagiaan atas semua yang telah kalian berikan.

Bandar Lampung, 23 Juni 2023

Tri Anjani
1713033021

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Batasan Masalah	8
1.4. Rumusan Masalah	8
1.5. Tujuan Penulisan	8
1.6. Manfaat Penelitian.....	9
1.7. Kerangka Berpikir	9
1.8. Paradigma	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Teori Konflik.....	11
2.2. Agitasi kebudayaan	13
2.3. Penguasaan Politik Kebudayaan	16
2.4. Seni dan Sastra	20
2.5. Partai Komunis Indonesia dan Lekra	22
III. METODE PENELITIAN	
3.1. Ruang Lingkup Penelitian	25
3.2. Metode Penelitian.....	25
3.3. Teknik Analisis Data	27
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil.....	29
4.1.1 Kondisi Masa Demokrasi Terpimpin	29
4.1.2 Seni Dan Sastra Sebagai Saluran Politik PKI	51
4.1.3 Hubungan Lekra dengan PKI	66
4.2. Pembahasan	71
4.2.1 Peran Seni dalam Kampanye PKI	72
A. Kesenian Reog	75
B. Kesenian Ketoprak.....	77
C. Kesenian Ludruk.....	80

4.2.2 Peran Sastra dalam Kampanye PKI.....	82
A. Kesenian Puisi	84
B. Kesenian Cerpen.....	89
V. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	92
5.2. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	98

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara Demokrasi setidaknya sudah berjalan lebih dari 60 tahun, dimulai pada masa revolusi dengan sistem pemerintahan presidensial dengan Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan, kemudian diganti dengan Sistem Parlemitter dimana jabatan Presiden sebagai Kepala Negara dipisahkan dari jabatan sebagai Kepala Pemerintahan Perdana Menteri. Beberapa tahun kemudian sistem pemerintahan diganti menjadi Demokrasi Parlemitter kemudian berubah menjadi Demokrasi Terpimpin hingga pada akhirnya berubah menjadi Orde Baru lalu kemudian menjadi Reformasi.

Demokrasi sendiri berasal dari kata *demos* dan *kratos* yang memiliki arti pemerintahan dari untuk dan oleh rakyat. Amin Rais (dalam Irawan, 2007) menjelaskan pengertian Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya yang memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupan termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah negara oleh karena kebijaksanaannya tersebut menenukan kehidupan rakyat.

Demokrasi di Indonesia berkembang seiring dengan pergolakan politik yang terjadi setelah kemerdekaan. Pada saat Revolusi Fisik (1945-1949) Indonesia yang baru merdeka disibukan dengan upaya mempertahankan kemerdekaan dari Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia, pada masa itu keluarlah Maklumat Wakil Presiden No. X, yang isinya mengubah bentuk pemerintahan dari Presidensial menjadi Parlemitter, hingga pada akhirnya

Belanda mengakui kedaulatan negara Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada 27 Desember 1949. Tahun 1950-1959 Indonesia menerapkan sistem politik Demokrasi Parlementer dengan berbagai macam pergolakan didalamnya, hingga keluarlah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berarti dimulailah era Demokrasi Terpimpin (Suwarno, 2015)

Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sistem politik yang berlaku yang berlaku di Indonesia ialah Demokrasi Terpimpin dengan ditandai beberapa ciri menonjol seperti (Suwarno, 2015), *Pertama*, kekuasaan Presiden Soekarno yang semakin besar, bukan hanya dibidang Eksekutif tetapi juga Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) dan Yudikatif (Badan Peradilan). Contohnya seperti; (1) Pembubaran Parlemen (DPRS) dan mengganti dengan DPRGR yang anggotanya dipilih sendiri oleh Presiden Soekarno pada 20 Maret 1960. (2) Penetapan Manifesto Politik sebagai haluan negara (GHBN) yang ditambahkan dengan USDEK (UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Dan Kepribadian Indonesia) melalui Penetapan Presiden No. 1/1960. (3) Pembubaran partai Masyumi pada tahun 1960. (4) Ide Sukarno untuk menggabungkan semua partai politik dalam satu gabungan besar dibawah pimpinannya.

Kedua, semakin kuatnya kedudukan Komunis (PKI), hal ini karena pimpinan PKI (Aidit, Lukman, dan Nyoto) berhasil merangkul Presiden Soekarno agar bersimpati dan mendukung PKI. Perkembangan PKI dapat dilihat dari jumlah anggota dan organisasi dibawahnya (*underbouw* PKI) jika pada tahun 1954 anggota PKI berjumlah 165.206 orang, maka pada saat menjelang peristiwa G30S anggota PKI sudah mencapai 2.5 juta orang. Jaringan PKI telah sampai ke desa-desa melalui *underbouw* nya seperti Barisan Tani Indonesia (BTI), Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) Pemuda Rakyat, Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), Corp Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). *Ketiga*, unsur militer (Tentara) mulai masuk dalam pemerintahan. Hal ini dilihat dari banyaknya tokoh-tokoh atau perwira militer yang diangkat menjadi anggota DPR-GR, Kabinet dan jabatan penting

dalam BUMN serta Departemen Pemerintahan. Hal ini juga menjadi perimbangan kekuatan dengan PKI.

Keempat, Kekuatan umat Islam, khususnya kalangan Islam modernis, seperti semakin dipinggirkan, hal ini dilihat dari pembubaran Masyumi dengan Surat Keputusan Presiden Soekarno No. 200/th. 1960 dan juga penangkapan pimpinan Masyumi serta dipenjarakan tanpa proses peradilan oleh rezim Demokrasi Terpimpinnya Soekarno. Pada akhirnya kekuatan umat Islam yang tersisa pada masa Demokrasi Terpimpin hanyalah Nahdatul Ulama (NU). *Kelima*, Perekonomian negara yang merosot. Hal ini disebabkan kecenderungan untuk mendukung pengawasan politik demi mempertahankan kestabilan serta adanya Politik “Mercusuar” Presiden Soekarno, Pembangunan Masjid Istiqlal, Stadion Senayan, Jembatan Semanggi yang telah menyedot banyak dana dan menimbulkan penurunan ekonomi negara. Selain itu, kebijakan Politik Revolusioner Presiden Soekarno juga menambah berat beban perekonomian negara.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa sistem politik Demokrasi Terpimpin menonjol pada terpusatnya suatu kepemimpinan pada satu pemimpin. Dalam praktiknya pun istilah terpimpin bukan lagi mengacu pada ideologi tetapi pada wujud pemimpin yang berupa pribadi pemimpin, yaitu Soekarno selaku Presiden RI, Pemimpin Besar Revolusi dan juga penyambung lidah rakyat. Salah satu kebijakan yang ditetapkan Presiden Sukarno pada masa ini ialah dengan menetapkan Manifesto Politik sebagai haluan negara (GHBN) dan ditambah dengan USDEK (UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Dan Kepribadian Indonesia). Istilah tersebut muncul dari pidato Soekarno dengan judul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang disampaikan pada ulang tahun kemerdekaan Indonesia tahun 1959. Pidato ini kemudian disahkan menjadi doktrin kenegaraan oleh Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Gagasan tersebut menurut Soyomukti digunakan oleh Presiden Soekarno

untuk mengarahkan Indonesia kesituasi Revolusioner dengan mengeksploitasi doktrin-doktrin tersebut (dalam Fadli, 2020).

Masa Demokrasi Terpimpin berlangsung dari tahun 1959 hingga 1965, konfigurasi politik yang ditampilkan pada masa ini seperti sistem Otoriter. Partai politik tidak leluasa kecuali Partai Komunis Indonesia (PKI) hal ini karena PKI memiliki kedekatan dengan Presiden Soekarno dan Presiden Soekarno memiliki kekuatan terbesar. Pada Maret 1960 ketika Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan membentuk DPR-GR, ia mengamankan PKI dengan memberikan 30 kursi, PNI diberi 44 kursi, dan NU 36 kursi, ketiga partai tersebut dipandang cocok oleh Presiden Soekarno dengan konsepsi NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis) yang digagasnya.

Selain kepemimpinan yang terpusat pada Presiden Soekarno, masa demokrasi terpimpin juga menjadi keuntungan tersendiri bagi PKI. Kekuatan PKI terlihat cukup pesat perkembangannya pada masa Demokrasi Terpimpin. Konsep NASAKOM yang diusung Presiden Soekarno membuat PKI dalam kedudukan politik tingkat nasional mendapatkan legalitasnya. PKI semakin melebarkan sayapnya disegala bidang, termasuk salah satunya adalah bidang kebudayaan. Kekuatan besar yang dimiliki PKI tidak terlepas dari usaha-usaha yang dilakukan kader-kader PKI. Strategi dan pendekatan yang dilakukan PKI ialah dengan sistem agitasi politik. Agitasi yang dilakukan PKI untuk memperoleh dukungan dari rakyat, dengan membawa isu-isu revolusioner yang dilakukan dari kaum tani dan buruh. Salah satu bentuk agitasi dari PKI ialah pendekatan yang dilakukan melalui organisasi dan kesenian. Berdasarkan hal tersebut, terdapat sebuah isu terkait hubungan PKI dengan salah satu organisasi kebudayaan di Indonesia, organisasi tersebut ialah Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra).

Lekra dibentuk pada 17 Agustus 1950 oleh D.N Aidit, M.S. Ashar, A.S. Dharta dan Njoto (Anwar, 2013). Kedekatan Lekra dengan PKI terlihat dari

keduanya dalam berbagai kegiatan baik itu politik maupun kebudayaan. Pada perkembangannya Lekra menjadi semakin dekat dengan PKI, keduanya saling membutuhkan demi kepentingan masing-masing. Lekra dan PKI memiliki kesepemahaman sehingga membuat Lekra merasa terfasilitasi, dan juga menguntungkan bagi PKI karena Lekra membantu PKI memberi dukungan pada acara-acara kebudayaan PKI seperti Pawai Massa dan Kongres (Estrelita, 2009).

Lekra mengadakan kongres I pada 27 Januari 1959 di Solo, Jawa Tengah, pada Kongres ini Lekra melahirkan dan mensahkan Mukadimah Lekra serta menunjukan sikap sesungguhnya yang membentuk langkah-langkah dan visi berkesenian dan berkebudayaan Lekra, yakni “Seni Untuk Rakyat” dan “Politik Adalah Panglima” (Estrelita, 2009). Hal tersebut menunjukan bahwa seni tidak hanya dapat dinikmati oleh kalangan tertentu saja akan tetapi seluruh rakyat dapat menikmati seni dan setiap karya Seni tidak dapat dilepaskan dari kehidupan Politik dimana didalamnya seharusnya berisi aspirasi rakyat. Lekra secara tegas menunjukan keberpihakannya kepada kelas yang dianggap kurang terdengar aspirasinya dan kalah dalam struktur masyarakat. Disinilah Lekra memiliki kedekatan Ideologis dengan PKI. Sehingga muncullah pertanyaan bahwa Lekra merupakan *onderbouw* dari PKI atau hanya sekedar sekawan dalam pemahaman Ideologi, khususnya dibidang Kebudayaan (Estrelita, 2009).

Lekra memiliki pemikiran dasar (dalam Jabut, 2017) yaitu Memerdekakan Rakyat, artinya seluruh rakyat haruslah terpenuhi seluruh haknya, seperti hak pendidikan, hak berekspresi dan hak atas kehidupan yang layak. Oleh karena itu Lekra sangat memerlukan bantuan politisi untuk memikul tanggungjawab memperjuangkan kemerdekaan rakyat tersebut. Politik sebagai Panglima merupakan sebuah prinsip yang harus dipegang oleh Seniman dan Budayawan, karena Politik menjadi penggerak Dinamika Sosial dalam Prespektif Ideologi. Pengabdian Lekra kepada rakyat dan selalu memikirkan kepentingan rakyat inilah yang juga membuat Lekra mendapat dukungan

penyerta dari PKI dan perlindungan Presiden Soekarno., sehingga Lekra mendapatkan fasilitas yang mumpuni serta posisi yang aman dalam menjalankan misi-misinya berkaitan dengan kebudayaan Indonesia.

Menurut Yulianti (Dalam Jabut, 2017) Lekra memiliki beberapa prinsip, diantaranya “Meluas dan Meninggi”. Meluas artinya kenyataan karya cipta berasal dari rakyat yang beragam, kaya dan luas di berbagai daerah dan diantara suku bangsa yang ribuan jumlahnya. Dalam konteks kerja kebudayaan Lekra, prinsip Meluas melingkupi semua jenis kebudayaan nasional dari berbagai daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Lekra menginginkan seluruh rakyat baik di Pedesaan maupun di Kota memiliki kesempatan untuk merasakan, melihat, memahami dan menciptakan Seni.

Prinsip selanjutnya adalah “Tinggi Mutu Ideologi dan Artistik”. Tinggi Mutu Ideologi merupakan kesenian yang dikembangkan mempunyai nilai untuk Mendidik. Mutu dalam hal ini diperoleh dari kesadaran Politik yang tinggi. Mutu artistik adalah bentuk karya yang diperoleh dari tafsir atas berkarya (Hamzirwan & Dkk, 2011). Lekra menginginkan Seniman berkarya atas pengabdian kepada rakyat, maka dari itu karya-karya yang dihasilkan diarahkan berdasarkan pada penafsiran atau pengamatan politik yang menciptakan keadilan untuk rakyat.

Prinsip selanjutnya menurut Hamzirwan adalah “Kreativitas Individual Dan Kearifan Massa” prinsip ini menjelaskan hubungan antara kesadaran para seniman pada realitas. Kesadaran ini bersifat Teoritik dan Teknis-Inovatif dalam upaya mengembangkan teori. Menurut Toer dikutip dalam Majalah Tempo (dalam Jabut, 2017) Kreativitas itu tidak boleh membuat Seniman sibuk dengan dirinya sendiri sehingga melupakan tugas (realitas) sosial. Prinsip ini berkaitan dengan prinsip sebelumnya yang mementingkan kepentingan rakyat diatas dirinya sendiri, maka dari itu Lekra menginginkan Seniman juga mengetahui politik ataupun kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk rakyat.

Prinsip yang terakhir ialah “Realisme Sosialis Dan Romantic Revolusioner”. Realisme Sosialis merupakan bentuk perjuangan kesadaran Ideologis dalam kesenian. Realisme Sosialis adalah penerapan sosialisme dibidang kreasi sastra, ia merupakan bagian integral dari kesatuan semangat perjuangan umat manusia dalam menghancurkan penindasan dan penghisapan rakyat, yakni Buruh dan Tani (Jabut, 2017).

Prinsip-prinsip diatas menunjukkan bagaimana Lekra sangat mengutamakan peran rakyat dalam setiap karya-karyanya dimana hal tersebut sejalan dengan PKI yang juga memiliki rasa keberpihakan tinggi terhadap rakyat. Hal tersebut tentu saja menjadi wajar ketika muncul sebuah polemik apakah Lekra dan PKI memiliki hubungan atau hanya sekedar sekawan karena kesepahaman ideologi saja. Lekra bergerak dibidang seni dan sastra, sesuai dengan prinsip Lekra, karya-karya yang dihasilkan Lekra tentu saja berlandaskan kepentingan rakyat dan juga dapat dinikmati oleh semua kalangan sehingga hal tersebut dapat membuat Lekra dekat dengan rakyat. Kedekatan PKI dan Lekra bisa saja merupakan strategi pendekatan PKI terhadap rakyat untuk mendapatkan dukungan mengingat Lekra cukup mudah mendapat dukungan rakyat karena keberpihakannya kepada rakyat maka bukan tidak mungkin PKI juga mendapatkan dukungan dari rakyat melalui Lekra

Kedekatan Lekra dengan Rakyat bisa saja dimanfaatkan PKI sebagai saluran politiknya untuk menarik simpati rakyat agar memberi dukungan kepada PKI. Melalui seni dan sastra yang diciptakan Lekra, rakyat dapat memberi dukungan kepada PKI karena PKI juga memberikan fasilitas kepada Lekra untuk menciptakan karya seni dan sastra yang berhubungan dengan kepentingan rakyat dan dapat dinikmati rakyat sebagai bentuk saluran politik PKI. Kemudian penulisan penelitian ini akan memfokuskan pada **Seni dan Sastra sebagai alat dan saluran Politik Partai Komunis Indonesia dalam penguasaan Politik di Indonesia**. Penelitian ini akan mengkaji Upaya

Agitasi dibidang Kebudayaan yang dilakukan oleh PKI untuk memperoleh kekuasaan dibidang Politik melalui Seni dan Sastra, dimana dalam hal ini PKI bekerja sama dengan Lekra.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Bentuk hubungan antara PKI dan Lekra
- 1.2.2. Bentuk-bentuk agitasi yang dilakukan oleh PKI
- 1.2.3. Peran Lekra dalam agitasi kebudayaan oleh PKI di Indonesia
- 1.2.4. Seni dan Sastra sebagai alat dan saluran Politik Partai Komunis Indonesia dalam penguasaan Politik di Indonesia

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis membatasi penulisan penelitian ini, yaitu: “Peran Seni dan sastra sebagai alat dan saluran politik Partai Komunis Indonesia dalam penguasaan politik di Indonesia”.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah penulisan penelitian ini yaitu: “Bagaimanakah peran seni dan sastra sebagai alat dan saluran politik Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam penguasaan politik di Indonesia?”.

1.5. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan penelitian ini adalah mengetahui dan mendiskripsikan “Peran seni dan sastra sebagai alat dan saluran politik Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam penguasaan politik di Indonesia”.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi dunia pendidikan khususnya bidang ilmu sejarah dan menambah wawasan pembaca mengenai agitasi kebudayaan oleh PKI dalam penguasaan politik melalui seni dan sastra.

1.6.2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memperluas keilmuan sejarah sehingga dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian mengenai agitasi kebudayaan oleh PKI dalam penguasaan politik melalui seni dan sastra yang lebih luas.

1.7. Kerangka Pikir

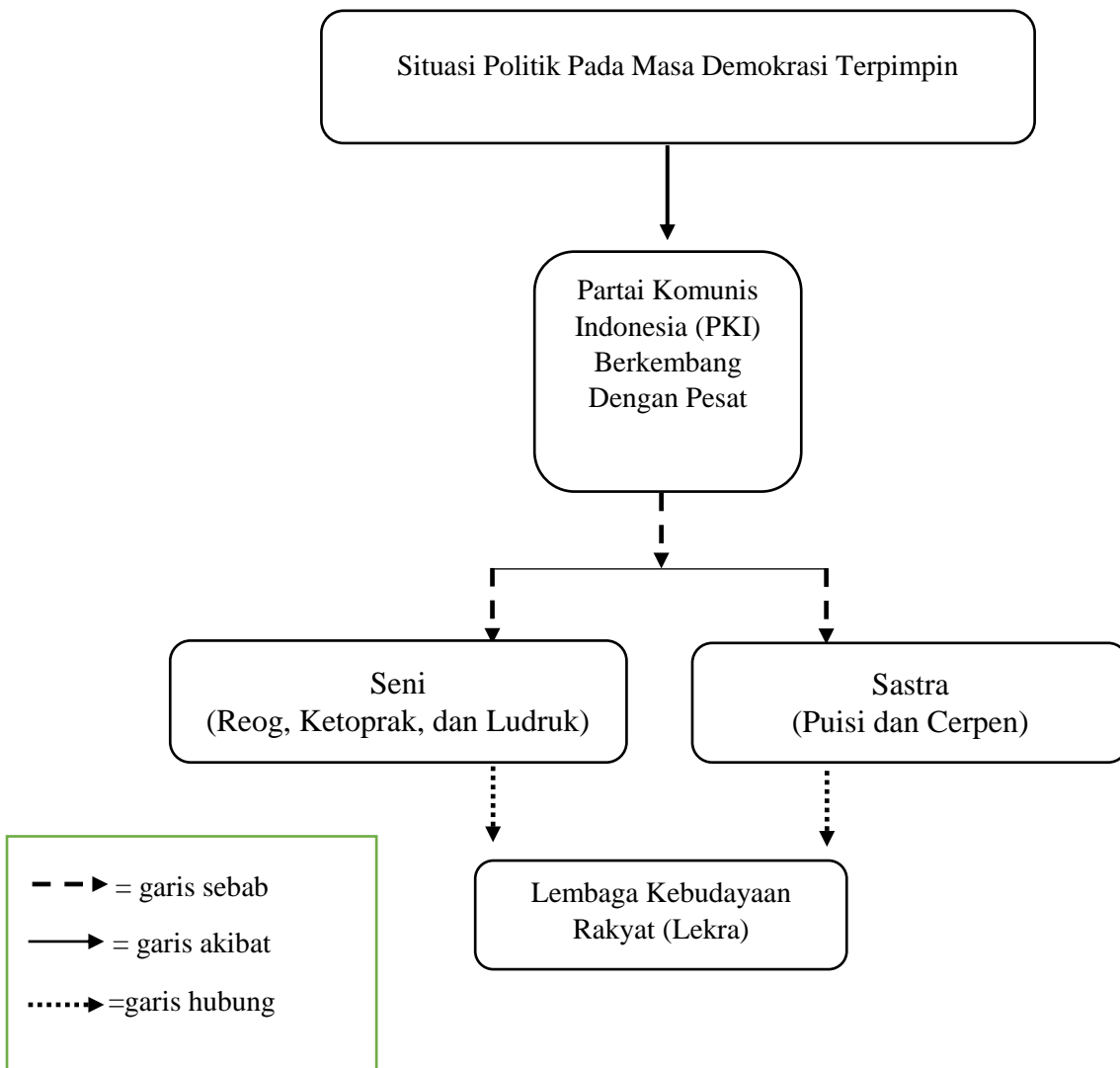
Penelitian ini berusaha untuk menemukan alat dan saluran politik dari Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam melakukan penguasaan politik di Indonesia. PKI memiliki sejumlah pendukung yang sangat banyak jumlahnya, hal tersebut tentu diperoleh dengan upaya-upaya yang tidak mudah. Pendukung PKI yang banyak tentu saja membuat PKI lebih mudah mencapai tujuannya dalam Penguasaan Politik di Indonesia.

Upaya yang dilakukan PKI dalam memperoleh dukungan dari rakyat salah satunya adalah dengan agitasi di bidang kebudayaan. PKI menganggap dengan melakukan agitasi di bidang kebudayaan dapat dengan mudah memperoleh dukungan dari rakyat. Salah satu upaya yang dilakukan PKI dalam agitasinya ialah melalui seni dan sastra.

Lekra merupakan lembaga kebudayaan yang mewadahi Sastrawan dan Seniman yang menyuarakan *Realisme Society* dimana hal tersebut sejalan dengan tujuan-tujuan penguasaan politik PKI. Bagaimana hubungan Lekra dan PKI akan menunjukkan bagaimana seni dan sastra sebagai alat dan saluran politik PKI dalam penguasaan politik di Indonesia.

Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana PKI dalam melakukan agitasi kebudayaan untuk penguasaan politik di Indonesia melalui seni dan sastra. Fokus pembahasan dalam penelitian ini ialah seni dan sastra sebagai saluran politik PKI dalam penguasaan politik di Indonesia dengan melihat bagaimana hubungan PKI dan Lekra.

1.8. Paradigma



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Konflik

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah Teori Konflik. Teori konflik dapat dikatakan sebagai kebalikannya dari Teori Struktural Fungsional, dimana teori ini membahas mengenai keteraturan dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat. Teori konflik membahas mengenai kemungkinan pertikaian dan konflik yang bisa terjadi dalam sistem sosial dan masyarakat.

Teori konflik memandang bahwa keteraturan dalam masyarakat tidak akan selamanya terjaga, buktinya konflik atau pertentangan atau ketegangan pasti pernah terjadi dalam suatu masyarakat. Teori konflik juga memandang adanya Koersi, Dominasi Dan Kekuasaan dalam masyarakat serta Otoritas yang berbeda-beda. Teori konflik juga diperlukan dalam masyarakat guna terciptanya suatu perubahan sosial (Tualeka, 2017)

Tokoh-tokoh sosiologi modern memiliki pendapat masing-masing mengenai Teori konflik, seperti berikut (dalam Tualeka, 2017) Karl Marx berpendapat bahwa konflik kelas diambil sebagai titik sentral dari masyarakat. Konflik antara kaum Kapitalis dan Proletar adalah sentral dimasyarakat. Kaum Kapitalis mengelompokkan populasi pada segelintir orang saja. Tetapi kelas-kelas yang terbentuk juga berlawanan antara satu dengan yang lainnya. Masyarakat kemudian terbagi mejadi dua kelas besar yaitu Borjuis dan Proletar.

Lewis A. Coser berpendapat bahwa konflik dapat merupakan proses yang bersifat Instrumental dalam Pembentukan, Penyatuan Dan Pemeliharaan

Struktur Sosial. Konflik dapat menempatkan dan menjadi garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik yang terjadi dalam kelompok dengan kelompok lain dapat menjadi kekuatan untuk mengembalikan identitas kelompok dan melindunginya agar tidak tergores dengan dunia sosial luar. Konflik menurut Coser terbagi menjadi dua yaitu pertama, Konflik Realistis berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan, dan yang ditunjukkan pada obyek yang dianggap mengecewakan. Kedua, konflik Non-Realistis, yaitu konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang Antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak.

Ralf Dahrendorf, memiliki dua teori yaitu Konflik dan Konsesus. Teoritis Konsesus menguji nilai integrasi dalam masyarakat dan Teoritis Konflik menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat bersama dihadapan tekanan tersebut. Dahrendorf menyadari bahwa masyarakat tidak akan terlepas dari unsur konsesus dan konflik yang menjadi persyaratan satu sama lainnya. Menurut Dahrendorf konflik berhubungan dengan perubahan, segera setelah konflik muncul suatu kelompok akan melakukan tindakan perubahan dalam struktur sosial. Bila konflik tersebut hebat, maka perubahan yang terjadi adalah Radikal, bila konflik disertai kekerasan maka perubahan struktur akan terjadi secara tiba-tiba.

Berdasarkan penjelasan diatas Teori Konflik ialah suatu Pertikaian atau Konflik yang terjadi dalam struktur sosial kehidupan masyarakat yang dapat menguatkan identitas suatu kelompok serta menimbulkan suatu perubahan didalam kehidupan sosial masyarakat tersebut. Konflik memiliki beberapa jenis menurut James A.F. Stoner dan Charles Wankel (dalam Muspawi, 2014) diantaranya: a) Konflik Intrapersonal, yaitu konflik seseorang dengan dirinya sendiri, biasanya karena memiliki 2 keinginan/kepentingan yang tidak mungkin terpenuhi keduanya secara bersamaan. b) Konflik Interpersonal,

yaitu pertengkaran seseorang dengan orang lain, akibat dari perbedaan kepentingan atau keinginan. c) Konflik antar individu-individu dan kelompok-kelompok, hal ini bisa saja disebabkan oleh cara masing-masing individu dalam menghadapi tekanan-tekanan untuk menjadi konformitas, yang ditekankan kepada mereka dalam lingkungan kerjanya. d) Konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama, konflik ini biasa terjadi dalam organisasi-organisasi seperti contohnya antara lini dan staf, pekerja dan pekerja. e) Konflik antarorganisasi, konflik ini biasanya disebut dengan persaingan.

2.2. Agitasi Kebudayaan

Agitasi/agi·ta·si/*n*1 Hasutan kepada orang banyak (untuk mengadakan huru-hara, pemberontakan, dan sebagainya), biasanya dilakukan oleh tokoh atau Aktivistis Partai Politik; 2 Pidato yang berapi-api untuk mempengaruhi massa (Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online/*daring*). Blumer (dalam Zakiyuddin, 2019) menyatakan bahwa Agitasi beroperasi untuk membangkitkan rakyat kepada suatu gerakan politik, baik lisan maupun tulisan dengan merangsang dan membangkitkan emosi khalayak. Agitasi merupakan salah satu bentuk spesialis dalam ilmu komunikasi baik dengan cara tertulis maupun secara lisan dengan membangkitkan ketidakpuasan, menimbulkan kegelisahan, membuat suatu kebingungan atau apabila kegelisahan, ketidakpuasan dan kebingungan tersebut sudah ada maka digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Agitasi menurut Arifi (dalam Malik, 2016) adalah sebuah upaya untuk menggerakkan massa dengan lisan atau tulisan, dengan cara merangsang dan membangkitkan emosi khalayak. Kegiatan Agitasi dimulai dengan membuat Kontradiksi dalam masyarakat dan menggerakkan khalayak untuk menentang kenyataan hidup yang dialami selama ini (penuh ketidakpastian dan penuh penderitaan). Tujuannya menurut Lumer Malik, 2016) adalah menimbulkan kegelisahan di kalangan massa, selanjutnya rakyat digerakkan untuk

mendukung gagasan baru atau Ideologi baru dengan menciptakan keadaan yang baru.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Agitasi sebagai hasutan atau upaya untuk menggerakkan khalayak banyak dengan lisan ataupun tulisan dengan cara membangkitkan emosi sehingga muncul ketidakpuasan, kegelisahan serta kebingungan untuk mencapai tujuan tertentu, Agitasi biasanya dilakukan oleh aktivis partai politik.

Orang yang melakukan agitasi disebut Agitator, yakni orang yang berusaha menimbulkan ketidakpuasan, kegelisahan, atau pemberontakan terhadap orang lain (Malik, 2016). Praktiknya, Agitasi cenderung “Menghasut” maka Agitasi sering disebut sebagai kegiatan “Provokasi” yang membangkitkan sebuah kemarahan, maka dari itu, Agitasi biasanya disangkut pautkan dengan hal-hal yang negatif karena sifatnya mengacu pada sifat-sifat negatif seperti menghasut, mengancam, menggelisahkan dan memunculkan atau mendorong adanya pemberontakan.

Beberapa perilaku kolektif yang dapat dijadikan sebagai pemicu dalam proses agitasi adalah (Yutma, 2013):

- 2.2.1. Perbedaan Kepentingan, seperti misalnya isu SARA (Suku, Agama dan Ras). Perbedaan kepentingan ini bisa menjadi titik awal keresahan masyarakat yang dipicu dalam proses agitasi.
- 2.2.2. Ketegangan sosial, ketegangan sosial biasanya timbul sebagai pertentangan antar kelompok baik wilayah, antar suku, agama, maupun pertentangan antara pemerintah dengan rakyat.
- 2.2.3. Tumbuh dan menyebarnya keyakinan untuk melakukan aksi, ketika kelompok merasa dirugikan oleh kelompok lainnya, memungkinkan timbul dendam dalam dirinya. Hal ini dapat menimbulkan keyakinan untuk dapat melakukan suatu aksi bersama.

Kebudayaan sendiri dapat dilihat dan dipahami sebagai salah satu sumber paling utama dari sistem tata nilai masyarakat yang dapat diharapkan dapat membentuk sikap mental atau bagaimana pola berpikir manusia (Melina, 2017). Beberapa ahli mendefinisikan pengertian kebudayaan sebagai berikut, menurut Koentjaraningrat (1923-1999) Kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan cara belajar. Menurut Clifford Geertz (1926-2006) Kebudayaan merupakan sistem keteraturan dari makna dan simbol-simbol. Simbol tersebut kemudian diterjemahkan dan diinterpretasikan agar dapat mengontrol perilaku, sumber-sumber Ekstraomatik Informasi, kemantapan individu, pengembangan pengetahuan, hingga cara bersikap. Sedangkan menurut Roger M. Keesing (1935-1993) mendefinisikan makna kebudayaan melalui dua pendekatan, yakni Adiptif dan Ideasional. Kebudayaan menurut Pendekatan Adiktif merupakan kontes pikiran dan perilaku. Sedangkan menurut Pendekatan Ideasional kebudayaan adalah semata-mata sebagai konteks pikiran. Berdasarkan definisi diatas peneliti menyimpulkan kebudayaan ialah sistem gagasan dan rasa serta tindakan yang diciptakan manusia dalam bermasyarakat yang diwujudkan dalam bentuk simbol-simbol untuk mengontrol perilaku hingga cara bersikap.

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi kehidupan manusia, salah satunya ialah mengatur tingkah laku masyarakat dalam upaya melindungi diri dari kekuatan alam dalam masyarakat yang tidak selalu baik (Rosana, 2017). Kehidupan yang semakin berkembang membuat kebudayaan kadangkala dituntut untuk mengikuti perubahan zaman, sehingga tidak jarang suatu masyarakat mengadopsi kebudayaan dari luar guna melindungi diri dan bertahan hidup pada perkembangan zaman. Menurut Moertopo, kebudayaan dapat menjadi strategi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, hubungan regional, hubungan internasional, pertahanan dan keamanan. Kebudayaan dipandang sebagai suatu kekuatan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan-tujuan nasional. Oleh karena itu, kebudayaan sering dijadikan alasan untuk

mencapai tujuan tertentu, salah satunya ialah tujuan politik. Pada masa orde lama kebudayaan sangat penting dalam perkembangan kehidupan bangsa. Para seniman memainkan peran dalam mendukung jalannya revolusi yang saat itu terjadi disegala bidang terutama bidang politik.

Berdasarkan pengertian diatas penulis mendefinisikan agitasi kebudayaan sebagai upaya propaganda atau menghasut atau menimbulkan suatu kegelisahan suatu massa dalam bidang kebudayaan sehingga muncul ketidakpuasan dalam diri masyarakat terutama dalam bidang kebudayaan sehingga menimbulkan suatu pemberontakan. Kebudayaan dianggap sebagai kekuatan untuk mencapai suatu tujuan-tujuan nasional maka tidak heran apabila agitasi dilakukan dalam bidang kebudayaan. Sebab melalui Kebudayaan suatu kelompok mungkin saja dapat menguasai masyarakat untuk mendukung terlaksananya tujuan-tujuan yang ingin dicapai kelompok tersebut.

Masa orde lama kebudayaan memiliki posisi yang istimewa dalam berjalannya proses revolusi. Beberapa kelompok kebudayaan hadir untuk turut mendukung berjalannya revolusi, bahkan beberapa partai politik berkoalisi dengan kelompok kebudayaan yang ada pada saat itu, misalnya saja Lekra (PKI), Lesbumi (NU), LKN (PNI), Lesbi (Partindo), Laksmi (PSII), Leksi, LKKI (Partai Katolik) dan ISBM (Muhammadiyah) (Anwar, 2013). Bahkan pada masa itu muncul konflik kebudayaan dimana hal tersebut terjadi antara lembaga kebudayaan yang cukup banyak massanya pada saat itu. Hal tersebut memperlihatkan bahwasannya kebudayaan menjadi ajang propaganda bahkan untuk menghasut masyarakat untuk mendapat dukungan dalam mencapai tujuan suatu kelompok.

2.3. Penguasaan Politik Kebudayaan

Penguasaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah cara, perbuatan menguasai atau menguasai, sedangkan politik adalah segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai

pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Berbicara penguasaan berarti berbicara mengenai kekuasaan. Kekuasaan dan politik adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dimana politik ialah salah satu wujud dalam mendapatkan kekuasaan, dan kekuasaan ialah energy atau kekuatan yang dimiliki suatu kelompok atau perorangan dalam melancarkan tujuan yang ingin diwujudkan. Jadi, kekuasaan dalam politik berarti mengumpulkan dan memposisikan energy perorangan dalam suatu kelompok guna mendapatkan kekuatan dalam melancarkan dan mewujudkan tujuan yang dikehendaki (Suryana, 2007).

Kekuasaan merupakan kapasitas yang dimiliki untuk mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku orang lain sesuai dengan keinginannya. Kekuasaan tersebut didapat dari beberapa sumber yang terbagi menjadi dua yakni kekuasaan formal dan personal. Kekuasaan biasanya berkaitan dengan politik. Politik sendiri ialah cara untuk turut berkontribusi dalam mengurus dan mengendalikan perihal masyarakat (Paramita, 2011). Kekuasaan terdiri dari tiga unsur, yaitu Tujuan, Cara dan Hasil. Tujuan dapat berarti tujuan yang baik dan tidak baik. Tujuan mempengaruhi cara dalam mendapatkan kekuasaan. Hasil dari kekuasaan itu sendiri dilihat dari bagaimana atau seberapa terpengaruh masyarakat terhadap kelompok penguasa tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas disimpulkan bahwa kekuasaan merupakan kekuatan atau kemampuan seseorang dalam mempengaruhi pola perilaku suatu kelompok guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan Politik ialah sebuah kontribusi dalam urusan kebijakan dan tindakan dalam mengendalikan masyarakat suatu negara. Kekuasaan sering kali berhubungan dengan politik, berikut beberapa pengertian politik menurut para Ahli (Nambo & Puluhalawa, 2005).

Menurut Deliar Noer (1983) Politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan

masyarakat. Menurut Miriam Budiardjo (1982), Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau Negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Menurut Gabriel A. Almond, Politik adalah kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan public dalam masyarakat tertentu diwilayah tertentu, dimana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif dan koersif.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Menguasai Politik artinya menguasai pola perilaku masyarakat dalam suatu negara. Penguasaan Politik sama dengan memiliki posisi yang tinggi di suatu negara sehingga memiliki wewenang atas negara tersebut beserta apa yang ada di dalamnya, oleh karena itu banyak partai politik berusaha mendapatkan posisi tersebut untuk menjalankan misi yang telah dibuatnya guna mencapai tujuan partainya.

Kebudayaan secara etimologis berasal dari beberapa bahasa, antara lain *Culture* (bahasa Inggris) yang berarti Budaya, *Colore* (Bahasa Latin) berarti Budaya, dan *Akhlaq* (Bahasa Arab) yang artinya Peradaban atau Budi. Kata “Kebudayaan” berasal dari bahasa Sansekerta yaitu *Buddhaya* yang merupakan kata lain dari *Buddhi* yang artinya Akal. Beberapa ahli mendefinisikan Kebudayaan sebagai berikut (Inrevolzon, 2013) Menurut Koentjaraningrat, Kebudayaan adalah keseluruhan manusia dari kelakuan yang teratur oleh tata kelakuan yang harus didapatnya dengan belajar dan yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Menurut R. Soekmono, Kebudayaan adalah keseluruhan hasil usaha manusia, baik berupa benda ataupun hanya berupa pikiran dan alam hidup. Menurut Mudji Sustrisno, Kebudayaan diartikan sebagai perwujudan kehidupan setiap orang dan setiap kelompok orang yang berupaya mengolah dan mengubah alam sehingga membedakan manusia dengan hewan, dengan demikian Kebudayaan bukan hanya pengetahuan, alat-alat, pakaian, melainkan

termasuk cara menghayati kematian, cara melaksanakan perkawinan dan lain-lain.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Kebudayaan merupakan usaha seseorang atau sekelompok orang dalam mewujudkan tata perilaku atau tingkah laku yang teratur yang didapatkan dari proses belajar. Hasil dari kebudayaan ialah bermacam-macam bukan hanya pakaian dan peralatan sehari-hari tetapi juga bisa pengetahuan, cara menghayati kematian, perkawinan dll.

PolitikKebudayaan dapat dipahami sebagai suatu proses pembentukan kekuasaan melalui bidang kebudayaan atau kesenian guna turut campur dalam pembuatan keputusan khususnya dalam Negara (Kistanto, 2015). Menurut Gari Nugroho (dalam Salam, 2008) PolitikKebudayaan adalah salah satu cara implementasi Strategi Kebudayaan. Strategi Kebudayaan mengandung dua aspek penting yaitu *pertama*, Strategi pengolahan cara bangsa ini berkreasi, berpikir, berperilaku, bertindak dan bekerja dalam menumbuhkan proses Berbangsa. *Kedua*, menunjukkan strategi menumbuhkan nilai keutamaan berbangsa yang menjadi dasar dalam proses membangun bangsa itu, seperti nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, profesionalisme, etika, respek, rasa malu, kerja keras, toleransi, cinta tanah air, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa PolitikKebudayaan merupakan suatu usaha penguasaan penentuan strategi dalam bidang kebudayaan untuk mengimplementasikannya di suatu negara. Seni budaya dan politik memiliki kaitan yang sangat erat. bahkan pada masa tertentu seni budaya dipandang sebagai sebuah produk dari proses politik pada kurun waktu 1950-1960an muncul lembaga kesenian dan kebudayaan yang berafiliasi dengan partai politik tertentu seperti Lekra (PKI), Lesbumi (NU), LKN (PNI), Lesbi (Partindo), Laksmi (PSII), Leksi, LKKI (Partai Katolik) dan ISBM (Muhammadiyah) (Anwar, 2013).

Pada masa Demokrasi Terpimpin terdapat sebuah kecenderungan agar setiap seniman harus memiliki pandangan politik dan ikut serta dalam sebuah organisasi politik (Susanti et al., 2019). Hal tersebut terlihat dengan berdirinya Lembaga-lembaga kebudayaan dalam tubuh partai politik. Kegunaan dari lembaga tersebut adalah untuk menarik massa dan mendukung pandangan partai politiknya sehingga partai tersebut memiliki pengaruh atau kekuasaan dalam pemerintahan.

PKI sama halnya dengan partai lainnya berusaha mendapatkan kursi tertinggi dalam perpolitikan di Indonesia pada masa itu, berbagai cara dilakukan oleh banyak partai guna mendapatkan suara dalam pemilihan umum (Pemilu) pada masa Orde Lama. PKI dengan caranya juga berusaha menarik simpati masyarakat guna mendapat suara dalam Pemilu guna dapat menguasai dunia perpolitikan di Indonesia.

2.4. Seni dan Sastra

Seni menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki 3 arti, *pertama*, kemampuan dalam menciptakan sebuah karya yang bermutu (dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya dan sebagainya). *Kedua*, karya yang diwujudkan melalui keahlian yang luar biasa seperti tari, lukisan, ukiran dan sebagainya. *Ketiga*, kesanggupan akal untuk menghadirkan sutau yang mempunyai nilai tinggi (luar biasa).

Beberapa ahli mengemukakan pengertian seni sebagai berikut (Sabatari, 2006) Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa Seni adalah segala perbuatan manusia yang timbul dari hidup perasaannya yang bersifat indah, hingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia lainnya. Menurut Sudarsono (2000) Seni adalah segala kegiatan dan hasil karya manusia yang mengutarakan pengalaman batinnya yang karena disajikan secara unik dan menarik memungkinkan timbulnya pengalaman atau kegiatan batin pula pada diri orang lain yang menghayatinya. Sementara Thomas Munro

mengemukakan bahwa seni adalah alat buatan manusia untuk menimbulkan efek-efek psikologi atas manusia lain yang melihatnya.

Menurut pengertian diatas, definisi seni ialah kemampuan menciptakan karya yang bermutu yang berasal dari pengalaman batin yang mempunyai nilai dan keindahan serta disajikan secara unik dan menarik sehingga menimbulkan efek-efek psikologis seperti menggerakkan jiwa perasaan manusia lainnya yang melihat dan menghayatinya, contoh seni ialah seni tari, lukisan, ukiran, musik dan sebagainya.

Sastra berasal dari bahasa Sanskerta *Shastra* yang memiliki arti “tulisan yang mengandung instruksi” atau disebut “pedoman”. Definisi Sastra pada masyarakat Indonesia masih bersifat kabur atau bias. Pengertian sastra merujuk pada kesusastraan yang diberi imbuhan ke-an. kata “Su” bermakna baik atau indah dan kata “Sastra” memiliki arti tulisan atau lukisan. Sedangkan menurut KKBI 2008 pengertian sastra ialah “karya tulis yang bila dibandingkan dengan tulisan lain, ciri-ciri kunggulan, seperti keaslian, keartistikan, keindahan dalam isi dan ungkapannya”. Karya sastra berarti karangan yang mengacu pada nilai-nilai kebaikan yang ditulis dengan bahasa yang indah (Syahfitri, 2018).

Menurut A. Teeuw, sastra didekripsikan sebagai segala sesuatu yang tertulis, pemakaian bahasa dalam bentuk tulis. Sedangkan Faruk mengatakan bahwa pada awalnya makna dari sastra amatlah luas, yakni melingkupi seluruh jenis aktivitas bahasa atau tulis-menulis. Namun, seiring berjalannya kebiasaan membaca dan menulis, pengertian sastra menyempit dan diartikan sebagai semua hasil aktivitas bahasa yang sifatnya imajinatif, baik dalam kehidupan yang tergambar didalamnya maupun bahasa yang digunakan dalam menggambarkan kehidupan tersebut. Sastra menurut Sarpadi (dalam Syahfitri, 2018) adalah lembaga sosial yang menggunakan bahasa sebagai medium. Bahasa itu sendiri merupakan ciptaan sosial. Sastra menampilkan gambaran kehidupan dan kehidupan itu sendiri adalah suatu kenyataan sosial.

Berdasarkan penjelasan diatas, pengertian Sastra ialah sebagai berikut yakni Sastra ialah sebuah tulisan yang berasal dari aktivitas imajinatif kehidupan sisal yang dibuat sedemikian indah dan berbeda dari tulisan biasa lainnya. Seni dan Sastra merupakan suatu kesatuan. Sastra merupakan bagian dari seni, salah satu wujud seni ialah Sastra. Seni memiliki berbagai wujud seperti seni music, seni lukis, seni tari dan seni sastra. Seni sastra ialah Seni yang berwujud tulisan.

Seni di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, pada masa penjajahan berdiri sebuah perkumpulan pelukis-pelukis Indonesia yang menentang penjajahan, Organisasi ini disebut Persagi (Persatuan Ahli-Ahli Gambar Indonesia) yang kemudian dibubarkan pada tahun 1942 pada masa pendudukan Jepang. Setelah itu muncul organisasi kebudayaan lain seperti SIM (Seniman Muda Indonesia) dan Pelukis Rakyat. Semakin hari keberadaan organisasi kesenian tersebut semakin tidak nampak bahkan dapat dikatakan hilang. Peristiwa KMB (Konferensi Meja Bundar) membuat organisasi kebudayaan baru mulai bermunculan. Wadah bagi seniman mulai muncul dan berjuang bersama dengan rakyat melalui sebuah karya seni, salah satunya ialah Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat). Lekra menjadi lembaga kebudayaan yang memiliki massa cukup banyak dalam waktu singkat, hal tersebut menimbulkan munculnya lembaga-lembaga kesenian lainnya yang bertendensi menginduk pada partai politik.

2.5. Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra)

Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan Partai Politik di Indonesia yang berideologi Komunis. PKI memiliki beberapa catatan dalam sejarah Indonesia, mulai dari pemberontakan melawan pemerintah Kolonial Belanda, pemberontakan di Madiun hingga dituduh membunuh 6 Jendral TNI AD Pada 30 September 1965 atau yang di kenal dengan peristiwa G30S/PKI (Hasanah, 2020). PKI memiliki cerita yang panjang dalam perjalanannya di

dunia politik di Indonesia. Setelah aksi pemberontakan yang dilakukan PKI mendapat kecaman dari berbagai pihak. Ketika PKI terbebas dari penindasan berlahan-lahan partai ini mulai menunjukkan dirinya. Pada tahun 1945 dikabarkan bahwa PKI ini memiliki anggota yang sangat besar.

Pemilihan umum tahun 1955 PKI turut dalam pemilu tersebut dan masuk dalam 5 partai teratas. Hal tersebut tentu merupakan pencapaian yang cukup tinggi bagi PKI. Mulai dari hal tersebut membuat PKI termotivasi untuk berusaha kembali mewujudkan tujuan politiknya yang sempat gagal. Berbagai upaya akan dilakukan oleh PKI untuk mencapai tujuannya, salah satu cara yang dilakukan ialah dengan menarik simpati rakyat Indonesia.

Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) ialah sebuah wadah bagi seniman dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Orang-orang dari lembaga ini ialah orang-orang yang memiliki tujuan cita-cita kebudayaan rakyat yang menuntut kemerdekaan dan kedaulatan. Lekra berdiri pada 17 Agustus 1950 di Jakarta (tepat lima tahun setelah kemerdekaan Indonesia) atas inisiatif D.N. Aidit, M.S. Ashar, A.S. Dharta, dan Njoto. Lekra menjadikan rakyat sebagai inti dari kegiatan mereka, rakyat yang dimaksud ialah bangsa Indonesia sendiri yang dianggap Lekra belum sepenuhnya terbebas dari penjajahan. Lekra muncul untuk menjadi suatu gerakan kebudayaan yang mendukung semangat revolusi. Lekra sengaja menyuarakan anti Kolonialisme, Imperialisme dan Kapitalisme melalui seniman dan sastrawan yang tergabung dalam Lekra (Jabut, 2017).

Lekra memiliki prinsip-prinsip dalam pelaksanaan kegiatannya, dimana dalam prinsip tersebut Lekra sangat mengutamakan kepentingan rakyat. Hal tersebut yang membuat Lekra disenangi rakyat dan mampu menarik simpati rakyat. Lekra memberikan sumbangan perubahan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, Lekra sangat mendukung adanya revolusi dengan berbagai karya, seperti karya seni, sastra dan lainnya (Jabut, 2017). Terdapat banyak karya seni lukis yang menceritakan realitas kehidupan rakyat dan

berbagai hal yang dapat mengembalikan kemurnian budaya-budaya lokal Indonesia.

Lekra berkembang sangat pesat dan memiliki banyak cabang dan anggota yang tersebar di berbagai daerah. Lekra yang mengabdikan diri kepada rakyat dan revolusi mendapat dukungan dari PKI dan Presiden Soekarno. Lekra dan PKI kerap terlibat dalam kegiatan yang sama baik politik maupun kebudayaan, hal tersebut yang membuat Lekra kerap kali dihubungkan dengan PKI bahkan dianggap sebagai *underbow* PKI. Beberapa petinggi PKI juga merupakan bagian atau tokoh penting dalam Lekra. Terdapat banyak anggapan bahwa PKI memanfaatkan Lekra untuk mendapatkan massa dan Lekra memanfaatkan PKI agar difasilitasi dalam kegiatannya.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

3.1.1. Objek Penelitian

Peran Seni dan Sastra Sebagai Alat dan Saluran Politik Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam Penguasaan Politik di Indonesia.

3.1.2. Subjek Penelitian

Partai Komunis Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin

3.1.3. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Arsip Nasional Republik Indonesia.

3.1.4. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pada tahun 2022.

3.2. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bertahap untuk mencapai tujuan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Historis atau Penelitian Sejarah. Metode Historis adalah penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis, atau dengan kata lain penelitian yang bertugas mendeskripsikan gejala, tetapi bukan yang terjadi pada waktu penelitian dilakukan (Wekkw & Dkk).

Penelitian mengenai Agitasi kebudayaan untuk Penguasaan Politik oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) melalui Seni dan Sastra ini, menggunakan metode Penelitian Sejarah, dengan langkah-langkahnya sebagai berikut (Herlina, 2020):

- 3.2.1. Heuristik adalah kegiatan/tahapan menemukan dan menghimpun sumber, informasi, jejakmasa lampau. Pada tahap ini akan dicari data atau sumber mengenai Agitasi kebudayaan untuk Penguasaan Politik oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) melalui Seni dan Sastra dengan cara mengajukan permohonan untuk mendapatkan salinan atas arsip yang sesuai dengan yang akan diteliti dari ANRI. Selain itu akan dilakukan pencarian buku atau informasi lain dari perpustakaan maupun internet terkait dengan hal yang akan diteliti baik berupa *hardfile* ataupun *softfile*.

Adapun arsip, buku dan jurnal yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Arsip Tekstual Komando Operasi Tertinggi 1963-1967, No. 439, 464 dan No. 802, Arsip Pidato Presiden RI Ir. Sukarno 1958-1967, No. 785. Buku *Lekra Tak Membakar Buku* karya Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan, Buku *Lesbumi: Strategi Politik Kebudayaan* karya Chisaan C, Buku *Prahara Budaya: Kilas-Balik Ofensif Lekra/PKI DKK (Kumpulan Dokumen Pergolakan Sejarah)*, Karya Moeljanto dan Taufiq Ismail. Buku *Lekra bagian dari PKI* Karya Ajib Rosidi, serta buku-buku dan jurnal lainnya.

- 3.2.2. Kritik adalah suatu proses untuk menilai sumber-sumber sejarah. Kritik dibagi menjadi dua yaitu Kritik Eksternal dan Kritik Internal. Penelitian ini akan menggunakan Kritik Eksternal dengan mempertimbangkan bahan dan bentuk sumber, umur dan asal dokumen, kapan dibuat dan siapa pembuatnya, berasal dari instansi mana, atas nama siapa, asli atau salinan, masih utuh ataukah sudah berubah, dalam hal ini akan dilakukan kritik terhadap data atau sumber yang telah diperoleh dari proses heuristic. Sumber akan dinilai dari kesesuaian dengan subjek yang akan diteliti terutama dari segi asal dokumen, apabila dokumen berasal dari pelaku atau memiliki kedekatan atau hubungan dengan pelaku, ataupun apabila dokumen berasal dari seseorang yang telah ahli dibidangnya maka

dokumendianggap layak dijadikan sumber rujukan. Sedangkan untuk kritik internal, peneliti akan mempertimbangkan isi dengan membandingkan dengan sumber-sumber lain atau dokumen lain untuk mendapatkan sumber yang dapat dipercaya dan dibutuhkan. Isi dari dokumen yang telah didapatkan akan dilihat dan dipertimbangkan keseuaiannya dengan subjek penelitian, apabila isinya sesuai dengan yang dibutuhkan maka dokumen layak dijadikan rujukan.

- 3.2.3. Interpretasi adalah setelah mendapatkan fakta dari sumber-sumber yang telah dipercaya atau telah melewati kritik sumber maka akan dilakukan penafsiran sehingga menjadi keseluruhan yang masuk akal. Setelah melalui proses kritik sumber, maka isi dari dokumen akan ditelaah dan di lakukan penafsiran sehingga menjadi satu kesatuan kesimpulan yang nantinya dapat dituliskan pada tahap selanjutnya
- 3.2.4. Historiografi adalah Tahapan Penulisan, hasil penafsiran atas fakta-fakta dituliskan menjadi sutau kisah sejarah yang selaras. Tahap ini akan dilakukan penyusunan atau penulisan dalam bentuk laporan sehingga tersusun konsep sejarah sistematis

3.3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Analisis Data Historis atau Teknik Analisis Data Sejarah. Teknik analisis data historis menurut Nugroho (dalam Sandika & Wuryani, 2018) adalah analisis data sejarah yang menggunakan kritik sumber sebagai metode untuk menilai sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan sejarah. Teknik analisis data historis menggunakan kritik dan interpretasi serta menarik dan menafsirkan kesimpulan dengan menggunakan tahap Historiografi (Putri et al., 2018). Sedangkan menurut Sartono (dalam Sandika & Wuryani, 2018) teknik analisis data historis adalah analisis yang mengutamakan ketajaman dan kekuatan dalam menginterpretasikan data sejarah. Inteprestasi dilakukan

karena fakta-fakta tidak dapat berdiri sendiri dan kategori dari fakta-fakta memiliki sifat yang kompleks.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa teknik analisis data historis atau teknik analisis data sejarah merupakan teknik analisis yang mengkritik sumber-sumber sejarah yang digunakan dalam penelitian sejarah dengan menggunakan ketajaman dalam menginterpretasikan fakta-fakta sejarah sehingga dapat ditarik dan ditafsirkan menjadi sebuah kesimpulan yang digunakan dalam tahap historiografi. Peneliti dalam hal ini akan melakukan analisis dengan interpretasi dan kritik terhadap data yang telah didapat agar kemudian dapat disusun menjadi suatu cerita sejarah yang relevan dan sesuai fakta.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa seni dan sastra memiliki peran sebagai alat dan saluran politik Partai Komunis Indonesia dalam penguasaan politik di Indonesia khususnya pada bidang seni pertunjukan dan seni sastra. Hal tersebut dilihat dari beberapa hal yaitu:

- 5.1.1. Peran seni pertunjukan sebagai alat saluran politik Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah dengan membantu kelompok kesenian seperti reog, ketoprak dan ludruk untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami, hingga kemudian membuat kelompok-kelompok kesenian tersebut mendukung Lekra dan PKI serta mengubah gaya karya mereka dan menciptakan karya-karya yang sejalan dengan Lekra dan PKI.
- 5.1.2. Peran seni sastra sebagai alat dan saluran politik Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah dengan memberikan tempat tersendiri pada koran harian rakjat untuk memuat karya sastra yang memiliki muatan propagandis atau dukungan untuk PKI.

5.2. Saran

5.2.1. Bagi Peneliti Lain

Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai seni dan sastra yang menjadi sarana kampanye PKI, karena masih banyak yang belum dikaji oleh para peneliti dan tentunya dapat dikaji lebih lanjut agar mendapat gambaran lebih jelas mengenai seni dan sastra yang menjadi sarana kampanye PKI serta kesenian bidang lain yang menjadi sarana kampanye PKI

5.2.2. Bagi Pembaca

Pembaca diharapkan dapat menambah wawasan dengan memahami kajian dalam penelitian mengenai: Agitasi Kebudayaan untuk Penguasaan Politik oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) Melalui Seni dan Sastra, serta dapat menggunakan penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan dengan bijaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. A. (2013). Peran Lesbumi dalam Merespon Gerakan Lekra pada Tahun 1950-1965. *Doctoral Distertation, UIN Sunan Ampel Surabaya*.
- Arif Ramadhan, W. (2018). Pemikiran Soekarno Dalam Pembangunan Ibukota Jakarta Pada Masa Demokrasi Terpimpin Tahun 1962-1964. *Doctoral Distertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*.
- Chisaan, C. (2008). *Lesbumi: Strategi politik kebudayaan*. LKIS Pelangi Aksara.
- Crouch, H. (1986). *Militer dan Politik di Indonesia*. Sinar Harapan.
- Daftar Arsip Pidato Presiden RI Ir. Soekarno 1958-1967 : No. 785 tentang Pidato Presiden pada Konferensi Seni dan Sastra Revolusioner di Istana Negara Jakarta
- Estrelita, G. T. (2009). Penyebaran Hate Crime oleh Negara Terhadap Lembaga kebudayaan Rakyat. *Doctoral Distertation, Universitas Indonesia. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*.
- Fadli, M. R. (2020). Pergumulan Partai Politik Islam Pada Masa Demokrasi Terpimpin: Masyumi Tumbang, NU Melenggang, PSII Bimbang. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 4(1), 34–49.
- Fatimah, S. (2018). Kampanye Sebagai Komunikasi Politik. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 1(1), 5–16.
- Hamzirwan, & Dkk. (2011). *50 Tahun Bumi Tarung*. Mahameru Offset Printing.
- Hasanah, S. (2020). *Sejarah Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Bahayanya: Menurut Sudut Pandang Islam*. Akademi Akuntansi Jayabaya.
- Herlina, N. (2020). *Metode Sejarah Revisi 2*. Satya Historika.
- Inventaris Arsip Tekstual Komando Operasi Tertinggi 1963-1967 :
- No. 439 tentang Ringkasan Pidato D.N. Aidit pada Kongres Ketoprak Seluruh Indonesia ke II, 25-31 Juli 1964 di Solo

No. 464 tentang Laporan Tambahan Tentang Kebudayaan “Dengan Sastra dan Seni Revolusioner Kita Jebol Kebudayaan Impereal dan Feodal” pada Konferensi Besar PKI di Bandung

No. 802 tentang Makalah Kesimpulan Hasil Riset Sastra dan Seni “Rakyat Jabar Mengganyang Setan2 Kebudayaan”.

Inrevolzon, I. (2013). Kebudayaan dan Peradaban. *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam*, 13(2).

Irawan, B. B. (2007). Perkembangan Demokrasi Di Negara Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 5(1), 54–64.

Jabut, T. (2017). Lekra dalam perkembangan Politik di Indonesia 1959-1965. *Doctoral Disertation Universitas Sanata Dharma*.

Joeniarto. (1990). *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bumi Aksara.

Kistanto, N. H. (2015). Tentang Konsep Kebudayaan. *SABDA: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 10(2), 1–11.

Kurniawan, A. S. (2012). Dinamika PKI Di Indonesia. *Skripsi Universitas Jember*.

Kusumaningrum, A. (2019). *Masa Demokrasi Terpimpin*. Maraga Borneo Tarigas.

Latief, A. M. (2018). Politik Sastra: Konflik Aliran Sastra Antara Lembaga Kebudayaan Rakyat (lekra) dan Manifes Kebudayaan (Manikebu) 1950-1965. *Doctoral Disertation Universitas Sumatera Utara*.

Mahega, A. (2013). Peran Lekra dalam Membentuk Kehidupan Budaya di Medan (1950-1966). *Doctoral Disertation Universitas Sumatera Utara*.

Malik, A. (2016). Agitasi dan Propaganda di Media Sosial (Studi Kasus Cyberwar Antar-Netizen Terkait dugaan Penistaan Agama Oleh Basuki Tjahaja Purnama). *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(3), 1–15.

Melina, S. . (2017). Peranan Kebudayaan dalam Membangun Politik di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Research Sains*, 3(1).

Muspawi, M. (2014). Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik dalam Organisasi). *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, 16(2), 41–46.

Nambo, A. B., & Puluhulawa, M. R. (2005). Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Dari Sistem Politik). *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 21(2), 262–285.

- Paramita, P. D. (2011). Keterkaitan Antara Politik dan Kekuasaan dalam Organisasi. *Dinamika Sains*, 9(21).
- Pujosantoso, S. (2018). *Demokrasi Liberal (1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1966)*. Derwanti Press.
- Putri, T. A., Syaiful, M., & Arif, S. (2018). Propaganda Jepang dalam Melancarkan Kebijakan Pendudukan di Indonesia Tahun 1942-1945. *PESAGI (Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah)*, 6(1).
- Rosana, E. (2017). Dinamisasi Kebudayaan dalam Realitas Sosial. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 12(1), 16–30.
- Rosidi, A. (2015). *Lekra Bagian dari PKI*. Dunia Pustaka Jaya.
- Sabatari, W. (2006). Seni: Antara Bentuk dan Isi. *IMAJI (Jurnal Seni Dan Pendidikan Seni)*, 4(2), 238–250.
- Salam, A. (2008). Pengajaran Sastra dan Politik Kebudayaan. *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 13(3), 369–381.
- Sandika, U. D., & Wuryani, E. (2018). *Nilai-Nilai Perjuangan Mangkunegara I Dalam Pembelajaran Sejarah (Kajian Babad Pangkunagara)*.
- Soedarmo, U. R. (2014). Perkembangan Politik Partai Komunis Indonesia (1948-1965). *Jurnal Artefak*, 2(2), 129–138.
- Suryana, A. (2007). *Kekuasaan Politik dan Kebijakan. Doctoral Distertation, Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Susanti, N., Supriatna, N., & Kurniawati, Y. (2019). Lekra Vs Manikebu: perlawanan Majalah Sastra Terhadap Politik Kebudayaan Pemerintah Masa Demokrasi Terpimpin (1961-1964). *FACTUM: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 8(1), 97–112.
- Suwarno. (2015). *Sejarah Politik Indonesia Modern (Cetakan 2)*. Ombak.
- Syahbuddin. (2017). Upaya Soeharto Memotong Pilar-Pilar Kekuasaan Soekarno. *Jurnal Pendidikan IPS*, 7(1), 1–11.
- Syahfitri, D. (2018). *Teori Sastra: Konsep dan Metode*. Pustaka Ilmu.
- Tualeka, M. W. N. (2017). Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, 3(1), 32–48.
- Utomo, L. B. (2011). Kesenian Reog Ponorogo Sebagai Sarana Agitasi Politik (Kajian Sejarah Politik Kesenian di Kabupaten Ponorogo tahun 1959-1965).

Skripsi Universitas Sebelas Maret.

- Violeta, S. S. (2012). Pengaruh Politik Terhadap Perkembangan Sastra Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin. *Skripsi Universitas Indonesia.*
- Wanandi, S. (2014). *Menyibak Tabir Orde Baru, Memoar Politik Indonesia 1965-1998.* Buku Kompas.
- Wekkw, I. S., & Dkk. (n.d.). *Metode Penelitian Ekonomi Syariah.* Gawe Buku.
- Widariyanti, C. (2022). Eksistensi Lekra dalam Pusaran Manifesto Kebudayaan Demokrasi Terpimpin. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah, 18*(1-7).
- Yanti, F. (2017). Peristiwa G-30-S/PKI Di Balik Penetapan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 1965. *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah, 2*(2), 33-40.
- Yuliantri, R. D. A. (2010). *Logika Hari Sastra "Kiri" Indonesia (1950-1965).* Universitas Negeri Yogyakarta.
- Yuliantri, R. D. A., & Dahlan, M. M. (2008). *Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat, 1950-1965.* Marakesumba.
- Yutma, R. T. A. (2013). Agitasi Politik Partai Komunis Indonesia di Desa Kedunggudel Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi 1960-1965. *Skripsi Universitas Sebelas Maret.*
- Zakiyuddin, A. (2019). Komunikasi Politik Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantio dalam Menanggapi Rencana Pembelian 500 Pucuk Senjata Standar TNI. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan Dan Administrasi Publik, 2*(1), 17-28.